

RENCANA KERJA
KEC. TROWULAN KAB. MOJOKERTO
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan3

1.4 Sistematika Penulisan4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Trowulan 16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja33

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....34

5.3 Rencana Tindak Lanjut34

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
17. Perbup No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil
4. langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Bab V Penutup

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Trowulan pada tahun 2023 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Belanja pada Kecamatan Trowulan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
			(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	100%	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000	100%	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100%	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.844.825.000,00	1.676.825.000,00	90,90%	167.915.769,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.825.000,00	1.676.909.231,00	90,90%	167.915.769,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.373.476,00	397.033.550,00	96,75%	13.339.926,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.100.000,00	19.290.400,00	95,97%	809.600,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.993.476,00	183.360.000,00	94,03%	11.633.476,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.220.000,00	71.670.000,00	99,24%	550.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.999.800,00	100%	200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000,00	3.060.000,00	100%	0,00
	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	34.733.350,00	99,24%	266.650,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.920.000,00	99,87%	80.000,00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.617.920,00	88.617.920,00	100%	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	100%	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.617.920,00	53.617.920,00	100%	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	119.000.000,00	118.674.600,00	99,73%	325.400,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.000.000,00	33.990.100,00	99,97%	9.900,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	69.684.500,00	99,55%	315.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.070.000,00	23.069.750,00	100,00%	250,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	23.070.000,00	23.069.750,00	100,00%	250,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	339.264.000,00	336.317.500,00	99,13%	2.946.500,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52.960.000,00	52.525.000,00	99,18%	435.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50.871.000,00	50.232.500,00	98,74%	638.500,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	61.580.000,00	61.145.000,00	99,29%	435.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	173.853.000,00	172.415.000,00	99,17%	1.438.000,00
	JUMLAH	2.837.650.396,00	2.653.038.320,00	93,52%	184.612.076,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Trowulan

Kode							Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah sd 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah sd 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
							Bidang Administrasi Pemerintahan									
4	01	4	01	20	06		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
4	01	4	01	20	06	05		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	78,17	79,07	79,69	100%	79,07	79,69	100%
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	05	4	01	20	16	25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	NA	22 Laporan	22 Laporan	100%	22 Laporan	22 Laporan	100%
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	93,55%	100%	90%	93,52%	102%	90%	93,52%	102%
2	07	4	01	20	15		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	NA	21 orang/bulan	21 orang/bulan	100%	21 orang/bulan	21 orang/bulan	100%

2	07	4	01	20	15	01	Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	85	81	83	83,27	100%	83	83,27	100%
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	07	4	01	20	15	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	NA	20 orang	20 orang	100%	20 orang	20 orang	100%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	07	4	01	20	16		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	6 paket	100%
2	07	4	01	20	16	08	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	8 paket	100%
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	NA	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
4	01	4	01	20	55		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%
4	01	4	01	20	55	01	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
							Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	NA	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	92%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	NA	15 unit	15 unit	100%	15 unit	15 unit	100%
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 Pelayanan	310 pelayanan	310	679	200%	310	679	200%
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada	7 Laporan	NA	9 laporan	9 laporan	100%	9 laporan	9 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.
 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
		Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
		Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
			Indeks Profesionalitas ASN
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja program. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel TC-30)
Pencapaian Kinerja Kecamatan Trowulan
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IKM Kecamatan			86,02	89,7	90	90,5	91	91,5	89,69	NA	90	90,5	
2	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			79,07	79,97	80,87	81,77	81	81,5	79,69	NA	79,7	80,5	
5	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			90%	92%	93%	94%	95%	96%	93,52%	NA	93%	94%	
6	Indeks Profesionalitas ASN			83	83	83,2	83,4	83,6	83,8	83,27	NA	83,2	83,4	
7	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Trowulan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Trowulan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Trowulan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal sehingga tujuan Kecamatan Trowulan dalam mendukung visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** pada misi ke tiga yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan”*** dapat terwujud dengan maksimal pula.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Trowulan antara lain :

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;
2. Belum memadainya kompetensi beberapa SDM yang ada;
3. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi;
4. Kurangnya pengawasan berbasis kinerja hingga menyebabkan tidak meratanya pembagian tugas;
5. Kurang meratanya pembagian kegiatan yang berhubungan langsung dengan kinerja selaku perangkat daerah dan yang tidak berhubungan dengan kinerja selaku perangkat daerah hingga berdampak pada kurang maksimalnya peran Kecamatan Trowulan terhadap perwujudan pencapaian visi dan misi daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 31)
Review terhadap Rancangan RKPD
Kecamatan Trowulan
Kabupaten Mojokerto

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja Program	100%	Rp 2.285.561.120	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja Program	100%	Rp 2.285.561.120	
			Persentase Realisasi Anggaran	94%				Persentase Realisasi Anggaran	94%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Rp 10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Rp 10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 5.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	Rancangan Awal Renja		1 dokumen			Rancangan Awal Renja		1 dokumen			
	Rancangan Renja		1 dokumen			Rancangan Renja		1 dokumen			
	Renja (sampai RKA - DPA)		1 dokumen			Renja (sampai RKA - DPA)		1 dokumen			
	P-Renja (sampai P-RKA - DPPA)		1 dokumen			P-Renja (sampai P-RKA - DPPA)		1 dokumen			

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	Rp 5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	Rp 5.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	SAKIP		1 laporan			SAKIP		1 laporan			
	LKJiP		1 laporan			LKJiP		1 laporan			
	LKPD		1 laporan			LKPD		1 laporan			
	Sinergitas Kecamatan		1 laporan			Sinergitas Kecamatan		1 laporan			
	LKPJ		1 laporan			LKPJ		1 laporan			
	Evalusi Renja Triwulan		4 laporan			Evalusi Renja Triwulan		4 laporan			
	LRA		12 laporan			LRA		12 laporan			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1 laporan	Rp 1.949.572.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1 laporan	Rp 1.949.572.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp 1.949.572.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp 1.949.572.000	
	Rincian :					Rincian :					
	Gaji		14 Orang / Bulan			Gaji		14 Orang / Bulan			
	TPP		14 Orang / Bulan			TPP		14 Orang / Bulan			
	Pengelola Keuangan		6 Orang / Bulan			Pengelola Keuangan		6 Orang / Bulan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	Rp 163.371.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	Rp 163.371.200	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 10.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 10.100.000	
	Rincian :					Rincian :					
	<i>Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya</i>		<i>12 paket</i>			<i>Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya</i>		<i>12 paket</i>			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	<i>AC</i>		<i>1 paket (2 unit)</i>			<i>AC</i>		<i>1 paket (2 unit)</i>			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 30.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	<i>Makanan dan Minuman Rapat</i>		<i>12 paket</i>			<i>Makanan dan Minuman Rapat</i>		<i>12 paket</i>			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 18.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 18.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	<i>foto copy, Cetak Amplop Dinas, Cetak Map Dinas</i>		<i>12 paket</i>			<i>foto copy, Cetak Amplop Dinas, Cetak Map Dinas</i>		<i>12 paket</i>			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.245.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.245.200	
	Rincian :					Rincian :					

	Koran per bulan		12 dokumen			Koran per bulan		12 dokumen			
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Rp 33.026.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Rp 33.026.000	
	Rincian :					Rincian :					
	ATK		12 paket			ATK		12 paket			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 60.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	SPPD		12 laporan			SPPD		12 laporan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	Rp 98.617.920	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	Rp 98.617.920	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 45.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	Listrik Kantor		12 laporan			Listrik Kantor		12 laporan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 53.617.920	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 53.617.920	

	Rincian :					Rincian :					
	<i>Tenaga Administrasi Kantor (4 orang)</i>		<i>12 laporan</i>			<i>Tenaga Administrasi Kantor (4 orang)</i>		<i>12 laporan</i>			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	92%	Rp 64.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	92%	Rp 64.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Rp 34.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Rp 34.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	<i>Pajak</i>		<i>1 Unit</i>			<i>Pajak</i>		<i>1 Unit</i>			
	<i>BBM</i>		<i>1 Unit</i>			<i>BBM</i>		<i>1 Unit</i>			
	<i>Service</i>		<i>1 Unit</i>			<i>Service</i>		<i>1 Unit</i>			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 12.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 12.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	<i>Pemeliharaan Gedung</i>		<i>1 Unit</i>			<i>Pemeliharaan Gedung</i>		<i>1 Unit</i>			
	<i>Pemeliharaan Pendopo</i>		<i>1 Unit</i>			<i>Pemeliharaan Pendopo</i>		<i>1 Unit</i>			
	Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp 18.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp 18.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	<i>Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll</i>		<i>15 unit</i>			<i>Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll</i>		<i>15 unit</i>			

2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	Rp 15.900.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	Rp 15.900.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 pelayanan	Rp 15.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 pelayanan	Rp 15.900.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	7 Laporan	Rp 15.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	7 Laporan	Rp 15.900.000	
	Rincian :					Rincian :					
	SKM (mendukung misi 3) tahunan		1 Laporan			SKM (mendukung misi 3) tahunan		1 Laporan			
	Laporan PATEN Triwulan		4 Laporan			Laporan PATEN Triwulan		4 Laporan			
	Laporan FKP		1 laporan			Laporan FKP		1 laporan			
	Laporan hasil layanan adminduk di kecamatan		1 laporan			Laporan hasil layanan adminduk di kecamatan		1 laporan			
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Rp 278.538.880	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Rp 278.538.880	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	25 fasilitasi	Rp 278.538.880	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	25 fasilitasi	Rp 278.538.880	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	Rp 43.400.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	Rp 43.400.000	
	Rincian :					Rincian :					
	Perdes APB Des		16 Laporan			Perdes APB Des		16 Laporan			
	Perdes PAPB Des		16 Laporan			Perdes PAPB Des		16 Laporan			
	Per Kades APB Des		16 Laporan			Per Kades APB Des		16 Laporan			
	Per Kades PAPB Des		16 Laporan			Per Kades PAPB Des		16 Laporan			
	lap Ikhtisar APB Des		16 Laporan			lap Ikhtisar APB Des		16 Laporan			
	LPPDes		16 Laporan			LPPDes		16 Laporan			
	CaLK Desa		16 Laporan			CaLK Desa		16 Laporan			
	Lap Realisasi APB Des		16 Laporan			Lap Realisasi APB Des		16 Laporan			
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	Rp 35.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	Rp 35.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
	Pra Musrenbang		1 Dokumen			Pra Musrenbang		1 Dokumen			
	Musrenbang		1 Dokumen			Musrenbang		1 Dokumen			
	Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan		1 Dokumen			Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan		1 Dokumen			
	Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa		1 Dokumen			Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa		1 Dokumen			
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Desa		1 Dokumen			Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Desa		1 Dokumen			
	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa		1 Dokumen			Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa		1 Dokumen			

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	Rp 61.400.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	Rp 61.400.000	
	Rincian :					Rincian :					
	Honorarium Tim Forkopimca		1 Dokumen			Honorarium Tim Forkopimca		1 Dokumen			
	Pembinaan Satlinmas		1 Dokumen			Pembinaan Satlinmas		1 Dokumen			
	Pemantauan dan Pengamanan Wilayah		1 Dokumen			Pemantauan dan Pengamanan Wilayah		1 Dokumen			
	Tanggap Bencana		1 Dokumen			Tanggap Bencana		1 Dokumen			
	Penertiban dan Penegakan Perda		1 Dokumen			Penertiban dan Penegakan Perda		1 Dokumen			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	Rp 138.738.880	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	Rp 138.738.880	
	Rincian :					Rincian :					
	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat		1 Dokumen			Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat		1 Dokumen			
	Hibah Sapi		1 Dokumen			Hibah Sapi		1 Dokumen			
	Pemberdayaan Masyarakat PKK		1 Dokumen			Pemberdayaan Masyarakat PKK		1 Dokumen			
	Pemberdayaan Masyarakat Forum anak, Karang taruna (salah satunya mendukung KLA)		1 Dokumen			Pemberdayaan Masyarakat Forum anak, Karang taruna (salah satunya mendukung KLA)		1 Dokumen			
	Pencegahan dan Penanganan Wabah		1 Dokumen			Pencegahan dan Penanganan Wabah		1 Dokumen			
	Fasilitasi Bantuan Sosial		1 Dokumen			Fasilitasi Bantuan Sosial		1 Dokumen			

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penambahan sub kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Penambahan sub kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah kedisiplinan dan kompetensi pegawai Kecamatan Trowulan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu -isu penting dari masing –masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan penelaahan usulan program dan kegiatan, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan. Sehingga rincian pada tabel 2.6 (T-C 32) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat daerah : Kecamatan Trowulan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Usulan Hibah Sapi	Trowulan	-	1	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan 5 agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah **Meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	82	84	85	86	87	88
		Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan	NA	78,17	79,07	79,97	80,87	81,77
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80%	81%	90%	92%	93%	94%
			Indeks Profesionalitas ASN	70	71	83	83	83,2	83,4
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	1	1	1	1

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Kecamatan Trowulan yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Kecamatan Trowulan Tahun 2025. Renja Kecamatan Trowulan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kecamatan Trowulan (RKA Kecamatan Trowulan) Tahun 2025.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun program dan kegiatan dari Kecamatan Trowulan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, mencakup kegiatan:
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Perumusan Program dan Kegiatan diatas ini ditujukan untuk mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** pada misi ke tiga yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan”*** agar dapat terwujud dengan maksimal.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan

Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dan prakiraan maju 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program		100%	Rp 2.285.561.120	DAU - Dana Transfer Umum		100%	Rp 2.514.117.232
		Persentase Realisasi Anggaran		94%				94%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi		100%	Rp 10.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		100%	Rp 11.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	Rp 5.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		4 Dokumen	Rp 5.500.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 Laporan	Rp 5.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		21 Laporan	Rp 5.500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu		1 laporan	Rp 1.949.572.000	DAU - Dana Transfer Umum		1 laporan	Rp 2.144.529.200

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/Bulan	Rp 1.949.572.000	DAU - Dana Transfer Umum		14 Orang/Bulan	Rp 2.144.529.200
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		90%	Rp 163.371.200	DAU - Dana Transfer Umum		90%	Rp 179.708.320
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	Rp 10.100.000	DAU - Dana Transfer Umum		12 Paket	Rp 11.110.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 10.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		1 Paket	Rp 11.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	Rp 30.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		12 Paket	Rp 33.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	Rp 18.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		12 Paket	Rp 19.800.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	Rp 2.245.200	DAU - Dana Transfer Umum		12 Dokumen	Rp 2.469.720
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 paket	Rp 33.026.000	DAU - Dana Transfer Umum		12 paket	Rp 36.328.600
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 60.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		12 Laporan	Rp 66.000.000

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	Rp 98.617.920	DAU - Dana Transfer Umum		100%	Rp 108.479.712
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 45.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		12 Laporan	Rp 49.500.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp 53.617.920	DAU - Dana Transfer Umum		12 Laporan	Rp 58.979.712
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		92%	Rp 64.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		92%	Rp 70.400.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Unit	Rp 34.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		2 Unit	Rp 37.400.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	Rp 12.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		2 Unit	Rp 13.200.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	Rp 18.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		15 Unit	Rp 19.800.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	Rp 15.900.000	DAU - Dana Transfer Umum		100%	Rp 17.490.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		500 pelayanan	Rp 15.900.000	DAU - Dana Transfer Umum		500 pelayanan	Rp 17.490.000

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		7 Laporan	Rp 15.900.000	DAU - Dana Transfer Umum		7 Laporan	Rp 17.490.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	Rp 278.538.880	DAU - Dana Transfer Umum		100%	Rp 306.392.768
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		25 fasilitasi	Rp 278.538.880	DAU - Dana Transfer Umum		25 fasilitasi	Rp 306.392.768
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	Rp 43.400.000	DAU - Dana Transfer Umum		8 Dokumen	Rp 47.740.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		6 Dokumen	Rp 35.000.000	DAU - Dana Transfer Umum		6 Dokumen	Rp 38.500.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen	Rp 61.400.000	DAU - Dana Transfer Umum		5 Dokumen	Rp 67.540.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		6 Dokumen	Rp 138.738.880	DAU - Dana Transfer Umum		6 Dokumen	Rp 152.612.768

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Trowulan Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Trowulan, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Trowulan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025

sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Trowulan Tahun 2025 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Trowulan diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Trowulan, Maret 2024

CAMAT TROWULAN



MUJIONO, S.Pd., S.Sos., M.M

Pembina Tingkat I

NIP.19690514 199302 1 003